

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara. Dimana dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan perekonomian masyarakat yang dapat terwujud melalui pemanfaatan dana dalam membangun prasarana yang berguna bagi kepentingan bersama. Disamping itu dengan adanya dana pajak, pemerintah dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial, rasa aman kepada masyarakat, serta menciptakan berbagai kondisi yang memungkinkan orang pribadi atau badan untuk mengembangkan diri dan usahanya. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Mengingat pentingnya dana pajak, pemerintah berusaha maksimal menyadarkan masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak.

Sejak tahun 1983, Indonesia mengganti peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda awalnya menganut *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Perubahan tersebut disebabkan karena sistem perpajakan yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, sistem pemungutan pajak *Official Assessment System* dianggap tidak mampu menggerakkan lapisan subjek pajak yang besar perannya dalam menghasilkan penerimaan negara yang diperlukan untuk peningkatan pembangunan nasional. Melalui sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* ini Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua macam yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dialihkan ke pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Bea Materai dan Cukai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa produsen ke konsumen.

PPN memiliki peran yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan PPh. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan PPh. PPh hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap PPN, pada dasarnya pengenaan PPN akan dibebankan kepada konsumen akhir. Karena merupakan pajak tidak langsung, pengenaan PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) yang sama dapat dikenakan berkali-kali. Namun demikian, PPN yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan BKP tersebut.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tetapi masih banyak masyarakat belum tau mengenai hal perpajakan, padahal sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah bertambah maju dari waktu ke waktu.

**Tabel 1.1**  
**Data Pajak Pertambahan Nilai Sumber Daya Keuangan (SDK)**  
**Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2015-2016 (Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2015	82.650.570
2016	371.126.766
Jumlah	453.777.336

Sumber: Sumber Daya Keuangan (SDK) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

PPN adalah salah satu pajak yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan organisasi Dinas Daerah dibidang kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Jenis jasa atau barang yang yang dipungut PPN oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu belanja barang dan belanja jasa.

Berdasarkan uraian diatas, disini penulis berusaha mendiskripsikan, mendalami, serta membahas suatu masalah dalam dunia perpajakan dengan mengagkat judul: **“PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Agar dalam penulisan laporan tugas akhir ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pembahasan pada tugas akhir ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Pengertian Umum Perpajakan
2. Pengertian dan Penjelasan Pajak Pertambahan Nilai
3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai
4. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
5. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
6. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Agar penulisan Tugas Akhir ini mempunyai arah dan tepat sasaran diperlukan adanya tujuan, adapun tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Perpajakan Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan
- c. Memberikan pengetahuan dan pengalaman dunia kerja bagi mahasiswa untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja
- d. Dapat mengetahui proses penghitungan pajak pertambahan nilai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai lebih baik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis
  - a. Agar mahasiswa memahami penerapan berbagai perangkat akuntansi, kesekretariatan maupun perpajakan yang telah dipelajari selama mengikuti matakuliah atau laboratorium di Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
  - b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk dapat memahami permasalahan nyata dunia kerja yang tidak diperoleh selama dalam perkuliahan, dan mampu untuk menggunakan perangkat perpajakan dalam menghadapi permasalahan tersebut.
2. Bagi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis
  - a. Memperoleh bahan masukan bagi pengembangan kurikulum serta modul untuk laboratorium.
  - b. Meningkatkan kualitas lulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar.
  - c. Secara tidak langsung, meningkatkan citra Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan menarik minat calon mahasiswa sebagai akibat dari lulusan yang baik dan diserap oleh pasar.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan pengumpulan data untuk bahan pembahasan masalah. Jenis data yang digunakan penulis antara lain:

#### **1. Data Primer**

Menurut pendapat Umar (1999,h.43) menyatakan bahwa : Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu atau perorangan. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen, data yang diperoleh yaitu data-data yang berdasarkan buku-buku, dokumen dan sebagainya, misalnya: peraturan perundang-undangan perpajakan dan buku perpajakan.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam menyusun tugas akhir ini dibutuhkan data yang lengkap, relevan, dan obyektif serta merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pengumpulan menggunakan tiga cara pengumpulan data, yang antara lain :

#### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari pihak perusahaan. Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara terhadap karyawan bagian bendahara di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

#### **2. Observasi**

Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam metode ini penulis melakukan observasi

terhadap SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan tugas akhir, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan fungsi tiap bagian perusahaan.

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Berisi tentang ulasan mengenai pengertian pajak secara umum dan pengertian tentang Pajak Pertambahan Nilai mulai dari subjek dan objek hingga pemungut Pajak Pertambahan Nilai, disamping itu pada bab ini juga dibahas mengenai tarif dan dasar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan juga membahas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi rangkuman serta kesimpulan uraian Bab III yang telah di tulis dalam pembahasan.